

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendidikan masyarakat memperoleh bekal berupa kemampuan dan keterampilan untuk bekerja di dunia industri sesuai dengan bidang yang diminati dan ditekuninya. Bekal tersebut juga akan memberi kekuatan kepada seseorang untuk dapat bertahan dan berkembang di dalam menjalani kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan, terutama dalam menghadapi globalisasi.

Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar, seperti: 1) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia, 2) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, terutama dalam pendidikan dan praktik berkewarganegaraan, 3) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. (Dirjen Dikti:2008)

Pada tahun 1994, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *perjanjian World Trade Organisation* dan perjanjian-perjanjian multilateral menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.7/1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian tersebut mengatur tata-perdagangan

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

barang, jasa dan *trade related intellectual property rights* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua jasa, kecuali “jasa non-komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya”. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan WTO yang mengatur perdagangan barang, jasa dan hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan (*trade related intellectual property rights*) harus dilaksanakan.

Salah satu *annex* (lampiran) dari World Trade Organization (WTO) adalah *General Agreement in Services* (GATS) atau perjanjian umum di dalam bidang jasa, yang dibicarakan pada putaran Doha tahun 2000. Di dalam perjanjian tersebut terdapat dua belas jenis jasa yang diperdagangkan, dan dua di antaranya adalah jasa pendidikan (*Educational Services*) serta pariwisata dan usaha transportasi wisatawan yang terkait (*Tourism and Travel Related Services*). Pemberlakuan perdagangan jasa ini sudah dimulai secara bertahap saat negara anggota diminta menyampaikan *schedule of Commitment*.

Selanjutnya pada Putaran Hongkong dibahas langkah-langkah untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan keputusan Doha dengan meminta kepada masing-masing negara anggota untuk menawarkan atau melakukan “*offering*” sektor-sektor yang akan diliberalisasi. Menurut Hidayat (2006) Indonesia telah menawarkan lima sektor jasa, yaitu konstruksi, telekomunikasi, bisnis, angkutan laut, pariwisata, dan keuangan. Pada putaran ini, Indonesia telah memasukkan lagi sektor

jasa pendidikan dan menawarkan liberalisasi jasa-jasa pendidikan, yakni: 1) jasa pendidikan menengah teknik dan vokasional, 2) jasa pendidikan tinggi teknik dan vokasional, 3) jasa pendidikan tinggi, 4) jasa pelatihan dan kursus bahasa, 5) jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola dan catur.

Hidayat (2006) mengungkapkan, di dalam perjanjian WTO tersebut ada aturan pokok dan kewajiban yang perlu dipahami, yaitu: 1) prinsip non-diskriminasi (*most-favoured nation clause*), 2) prinsip integrasi ekonomi, (*economic integration Clause*), 3) prinsip keterbukaan (*transparency*). Hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh warga negara dan badan usaha di dalam perjanjian tersebut adalah tentang komitmen khusus, yaitu:

1. Akses Pasar (*market access*); yaitu cara pemasokan (*mode of supply*) yang menyebutkan bahwa setiap anggota organisasi perdagangan dunia, harus memberikan jasa dan pemasok jasa dari negara lain, memberikan perlakuan yang tidak berbeda kepada yang bersangkutan sesuai dengan dengan persyaratan, pembatasan dan kondisi yang disepakati dalam *Schedule of commitment*. Di dalam perjanjian tersebut terdapat empat moda yang diterapkan, yakni: 1) *Cross Border Supply*, 2) *Consumption abroad*, 3) *Commercial Presence*, 4) *Movement of Natural Persons*.
2. Perlakuan Nasional (*National Treatment*), yaitu bahwa setiap negara peserta harus memberikan perlakuan yang sama kepada jasa dan pemasok jasa dari

negara lain dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa yang berasal dari negara setempat.

Liberalisasi menuju perdagangan bebas jasa yang dipromosikan oleh WTO adalah untuk mendorong agar pemerintah negara anggota tidak menghambat empat moda penyediaan jasa tersebut dengan kebijakan-kebijakan intervensionis. Dari komitmen khusus tersebut di atas, yang menarik perhatian peneliti adalah akses pasar, terutama moda keempat, yaitu *Movement of Natural Persons* yang mengandung arti bahwa setiap warga negara yang kompeten dari seluruh negara peserta dapat bekerja di negara peserta lainnya dengan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya. Menyimak hal yang dikemukakan oleh Hidayat tersebut, maka dapat dilihat bahwa persaingan kerja akan semakin tinggi, pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dinas pendidikan, ketenaga kerjaan, para pemangku kepentingan, dunia industri pariwisata dan masyarakat harus bahu membahu dalam mempersiapkan masyarakat yang berkemampuan dan terampil dalam bekerja di bidang pariwisata, sehingga dapat hidup berdampingan dengan warga negara seluruh negara anggota *World Trade Organization* yang bergerak di bidang perdagangan jasa pariwisata dan jasa pendidikan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan pariwisata dalam mensejahterakan masyarakat, dibutuhkan formulasi strategi yang baik karena pada era ini tentunya berbeda dengan era sebelum diberlakukannya

General Agreement in Services (GATS). Tahun 2020 adalah tahun yang disepakati sebagai awal resmi diberlakukannya era perdagangan bebas. Persiapan untuk menyambut masa tersebut tentunya telah dilakukan oleh para anggota termasuk Indonesia. Salah satu bagian yang ada dalam formulasi strategi adalah tentang pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menghadapi tahun 2020, industri pariwisata memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan mensyahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 2 tahun 2007, tanggal 25 Januari 2007 tentang *Asean Tourism Agreement* atau persetujuan Pariwisata Asean. Pasal 8 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa negara anggota wajib bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang industri pariwisata dengan:

- (1) Merumuskan pengaturan tanpa hambatan untuk memudahkan negara anggota ASEAN menggunakan tenaga ahli pariwisata *professional* dan tenaga kerja terampil yang ada di kawasan ASEAN berdasarkan pengaturan bilateral.
- (2) Mengintensifkan upaya berbagi sumberdaya dan sarana untuk program pendidikan dan pelatihan pariwisata.
- (3) Meningkatkan kurikulum dan keterampilan pariwisata dan merumuskan standar kompetensi dan prosedur sertifikasi yang mengarah pada saling pengakuan atas keterampilan dan kualifikasi di kawasan ASEAN.

- (4) Memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan SDM, dan
- (5) Melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, kelompok negara dan lembaga-lembaga international dalam pengembangan SDM di bidang pariwisata.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.7/1994 *tentang Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 2 tahun 2007, tanggal 25 Januari 2007 *tentang ASEAN Tourism Agreement* atau persetujuan pariwisata bagi negara-negara anggota ASEAN tersebut menyebabkan terbentuknya paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan berbagai potensi. Wewenang pada perguruan tinggi tersebut berhubungan dengan masa yang akan datang dalam jangka yang panjang, untuk itu dibutuhkan keputusan strategis.

Sehubungan dengan masuknya pendidikan (*educational services*) dan pariwisata (*tourism and travel related services*) ke dalam jasa yang diperdagangkan di era globalisasi tahun 2020, maka pendidikan dan pariwisata Indonesia dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu agar mempunyai *competitive advantages* dan membantu menciptakan kesuksesan di masa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan paradigma baru penataan sistem pendidikan tinggi, yang mulai diterapkan pada Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran (SP4) sejak 1997. Perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan yang mengacu pada peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan evaluasi yang sistematis dan mendalam dari mulai perumusan ide kurikulum, perencanaan dan dokumentasi kurikulum, implementasi kurikulum sampai pada evaluasi hasil akhir kurikulum.

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses pendidikan memiliki peran penting dalam optimalisasi pencapaian program-program yang direncanakan oleh pemerintah dan sektor privat, maka masyarakat sudah mulai harus diajak pada pemikiran yang lebih terbuka, bahwa fungsi layanan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah menganut paradigma seperti itu, dengan demikian dunia industri sebagai badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta perlu dimintakan tanggung jawab dan kontribusi yang lebih besar dalam penyediaan layanan tersebut, dan salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih di tempatnya, baik sebagai tenaga pelaksana, pengawas maupun manager.

Dunia industri pariwisata dan dunia pendidikan bekerja sama dalam memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan seluruh aspek

pribadi peserta didik. Jika tanggung jawab dunia industri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih di tempatnya, maka tanggung jawab lembaga pendidikan adalah menyusun kurikulum dan materi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar kerja di masa yang akan datang, di mana peserta didik selesai menjalankan pendidikan dan mulai bekerja. Tanggung jawab industri dan lembaga pendidikan tersebut merupakan dua hal penting yang harus dilakukan agar pelaksanaan pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan berjalan harmonis, seiring dan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pariwisata.

Kebutuhan pasar kerja pariwisata masa kini dan masa yang akan datang akan meningkat seiring dengan kebutuhan perdagangan bebas tahun 2020. Sumber daya usaha pariwisata, pada saat ini dan masa yang akan datang memiliki kesempatan dan peluang kerja yang sangat tinggi, karena jasa pariwisata berada di dalam persaingan perdagangan tingkat dunia. Dengan demikian bidang pariwisata diharapkan mampu meraih serta memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut. Untuk menjamin agar SDM pariwisata dapat bersaing di tingkat dunia, dan agar penerimaan pekerjaan dan lingkungan tetap terjaga, serta untuk melindungi kepentingan terbaik dari orang-orang yang terlibat dalam sektor pariwisata, maka diperlukan lembaga pendidikan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas tinggi.

Di dalam laporan akhir Strategi Pengembangan SDM bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga tahun 2009 (www. Kemenparekaf:2012) tertulis bahwa sampai saat ini daya saing dan kualitas tenaga kerja pariwisata Indonesia masih rendah atau menempati peringkat 40 dari 133 negara yang menjadi sampel telaah. Selanjutnya UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja bidang pariwisata wajib memiliki standar kompetensi kerja. Di dalam laporan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan harapan agar sektor pariwisata Indonesia berkembang dan berada paling depan di antara negara lain dengan tingkat daya saing yang tinggi. Penekanan harapan tersebut terutama ditujukan pada SDM pariwisata, khususnya yang bergerak di sektor perhotelan, restoran, dan SPA.

Melihat posisi kualitas SDM pariwisata tahun 2009, dan menimbang kewajiban bahwa setiap tenaga kerja memiliki standar kompetensi yang diatur oleh UU harus memiliki kualitas dan kompetensi yang diakui sekaligus berstandar internasional. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Menurut UU RI NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, ayat (21), evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya, dalam UU yang sama, Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi, Bagian kesatu pasal 57, ayat (1) tertulis bahwa: evaluasi dilakukan

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dalam Pasal 58, ayat (2) evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional. Di dalam Bab IV, tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, Bagian Kesatu, tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, pasal 8 dikatakan bahwa masyarakat berhak, berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pendidikan vokasi dan profesi mengajarkan keahlian terapan, menekankan pada perkembangan skill, afektif kognitif dan psikomotorik, maka lebih jauh, tingkat keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tingkat profesionalisme yang dipunyai lulusannya, tetapi juga oleh kesempatan yang terbuka bagi lulusannya untuk mendapatkan tempat kerja yang sesuai di pasar kerja (*labor market*).

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja, untuk itu orientasi pendidikannya harus tertuju pada lulusannya yang dapat dipasarkan di pasar kerja. Menurut Calhoun & Finch (1982:66), "*vocational education can develop a marketable man by developing his ability to perform skills that extend his utility as a tool of production*". Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan vokasi dapat mengembangkan manusia yang

mempunyai daya jual tinggi, dengan cara mengembangkan kemampuannya dalam membentuk keahlian yang dapat meningkatkan kegunaan dirinya sebagai alat produksi. Untuk melihat pencapaian sasaran dan pendayagunaan pendidikan kepariwisataan, maka diperlukan sebuah evaluasi kurikulum pendidikan pengembangan sumber daya manusia pariwisata tersebut.

Vocational education should be evaluated on the bases of economic efficiency. Vocational education is economically efficient when (a) it prepare students for specific jobs in the community on the basis of man power needs, (b) it ensures an adequate labour supply for an occupational area, and (c) the student gets the job for which he was trained (Calhoun & Finch 1982:66)

Pernyataan tersebut mengandung arti bawa pendidikan vokasi tersebut harus dievaluasi untuk melihat apakah secara ekonomi efisien. Dikatakan efisien jika (a) pendidikan vokasi menyiapkan peserta didik untuk melaksanakan pekerjaan yang spesifik di dalam masyarakat dengan basis kebutuhan akan tenaga tersebut, jika yang disiapkan itu oleh pendidikan vokasi itu tenaga manajerial, tetapi masyarakat pengguna lulusan tidak membutuhkan tenaga manajerial, maka pendidikan tersebut bisa dikatakan secara ekonomi tidak efisien. (b) pendidikan tersebut menjamin kecukupan pasokan tenaga untuk lapangan pekerjaan, dan, (c) lulusan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dilatihkan dalam pendidikan, Jadi jika di sekolah peserta didik dilatih sebagai supervisor dan sebagai manajer, tetapi setelah lulus bekerja sebagai tenaga pelaksana, maka dapat dikatakan pendidikan vokasi tersebut secara ekonomi tidak efisien.

Evaluasi kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah pendidikan vokasi. Menurut Hasan (2008:41) evaluasi kurikulum adalah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Hasan menambahkan bahwa keberlakuan kurikulum dibatasi oleh waktu. Kurikulum yang sesuai untuk konteks waktu tertentu belum tentu cocok untuk waktu yang lain, walaupun diberlakukan di tempat yang sama. Hal ini disebabkan karena perubahan variabel lingkungan makro, lingkungan yang tidak bisa dikendalikan seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, persaingan, informasi teknologi dan hal lainnya yang menandakan perkembangan zaman. Lingkungan makro tersebut walaupun tidak bisa dikendalikan, tapi harus diperhatikan karena akan memberikan pengaruh dan menentukan nilai dan kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut kurikulum merupakan variabel yang dapat dikendalikan, artinya dapat dikendalikan oleh pemerintah, oleh pengembang kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukannya, baik lokal, nasional, regional maupun masyarakat dunia. Jika tidak, maka kualitas hasil dari pendidikannya akan menjadi rendah dan usang.

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), merupakan lembaga pendidikan pariwisata berbasis kompetensi, di mana di dalamnya terdapat Program Diploma IV, Studi Administrasi Perhotelan,

yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga manajerial. Program ini telah dibuka sejak tahun 1992 (Sadkar:2012).

Di dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: PM.No.48/DL.107/MKP/2010 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Program Diploma pada Pendidikan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pasal 7 menyatakan bahwa Evaluasi Kurikulum Program Diploma Pada Pendidikan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Dari hasil pengamatan dan wawancara terindikasi bahwa perlu dilakukan evaluasi terkait relevansi tujuan program dengan kebutuhan industri, evaluasi tentang performa kurikulum, konsistensi tujuan kurikulum dengan dokumen kurikulum, serta implementasi dan evaluasi hasil kurikulum. Peneliti khawatir bahwa kurikulum KBK prodi ADH kurang mendukung pencapaian tujuan, karena untuk menjadi seorang manager, banyak faktor yang harus dipenuhi,

Peneliti melihat adanya jarak antara kualifikasi yang dimiliki lulusan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh "user" yang mungkin disebabkan oleh perubahan yang terjadi antara waktu kurikulum disusun dengan masa kini, hal lain yang lebih memberatkan lagi profil lulusan tersebut kini tercantum dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.48/DL.107/MKP/2010. Untuk itu diperlukan pengkajian ulang atau evaluasi tentang relevansi dan konsistensi program pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan dengan kebutuhan industri,

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dimulai dari ide kurikulum (pengembang) dan rencana tertulis kurikulum (dokumen) hingga implementasi kurikulum, evaluasi hasil yang dilakukan secara khusus.

B. Fokus Permasalahan Penelitian

Adapun fokus permasalahan penelitian evaluatif ini adalah melihat kembali kesesuaian ide kurikulum pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan dalam menjawab tuntutan lapangan pekerjaan, dengan menelusuri sejarah perkembangan kurikulum program studi, melihat performa dokumen kurikulum tersebut, keterkaitan implementasi kurikulum dengan pencapaian tujuan sejak awal hingga saat ini dan melihat konsistensi dari ide kurikulum dengan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum serta berdasarkan sejarah perkembangan tersebut dapat dilihat kemungkinan *outcomes* dari kurikulum yang digunakan saat ini.

C. Perumusan Masalah

Di dalam studi evaluasi model Responsif, isu-isu yang muncul di dalam sebuah organisasi dianggap sebagai “*conceptual organizers*”. Model tidak menghendaki adanya hipotesis, tujuan, atau persamaan regresi. Isu-isu tersebut dapat berupa kegelisahan, kebingungan, ketidakjelasan, keruwetan, problema, penilaian subjektif terhadap program atau organisasi yang dirasakan oleh orang-orang yang terkait dengan program tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Stake:1996 sebagai berikut:

“Issues are suggested as “conceptual organizer” for the evaluation study, rather than hypotheses, objectives, or regression equation. Issues are organizational perplexities or problems. The term “issues” draws thinking toward complexity,

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

particularity, and subjective valuing already felt by persons associated with the program.

Karena peneliti adalah dosen di program studi tersebut maka isu-isu kurikulum telah dirasakan bersama dan terlihat baik oleh pengelola program maupun oleh dosen. Permasalahan kurikulum yang kompleks sejak berdirinya program studi, hingga kini berpotensi untuk menjadi masalah besar, sehingga memerlukan penyelesaian yang seksama dan segera. Isu- isu yang muncul diseleksi dan beberapa dipilih untuk dijadikan dasar dalam menyusun struktur atau kerangka dalam melanjutkan diskusi serta rencana pengumpulan data. Dengan demikian data dikumpulkan melalui observasi yang sistematis, dan wawancara yang mendalam, dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan memecahkan permasalahan kurikulum.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di atas maka dapat dirumuskan empat isu pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ide kurikulum pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan merupakan pikiran kurikulum masih sesuai untuk menjawab tuntutan lapangan pekerjaan pada saat ini?
2. Bagaimanakah konsistensi dari ide kurikulum, dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum tersebut?

3. Bagaimanakah performa kurikulum sebagai dokumen, program pendidikan Hospitaliti Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
4. Apakah implementasi kurikulum mendukung pencapaian tujuan?

Isu pokok tersebut diangkat menjadi pertanyaan penelitian, seperti di bawah ini:

1. Bagaimanakah kesesuaian ide kurikulum pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan dalam menjawab tuntutan lapangan pekerjaan?
2. Bagaimanakah konsistensi ide kurikulum dengan dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum serta *outcomes* dari kurikulum?
3. Bagaimanakah performa kurikulum sebagai dokumen, program pendidikan Hospitaliti Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung?
4. Bagaimanakah keterkaitan implementasi kurikulum dengan pencapaian tujuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk:
 - a. Menilai konsep besar bidang studi kurikulum, yaitu konsep relevansi, dalam studi ini relevansi antara desain dengan tuntutan lapangan. Tujuan ini memberikan makna yang kuat bagi bidang studi kurikulum karena suatu kurikulum harus memenuhi relevansi antara manusia apa yang akan dihasilkan

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kurikulum dengan pemanfaatan kualitas yang dimiliki manusia tersebut di kehidupan di masyarakat pada waktu yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya. Sedangkan relevansi tersebut ditetapkan pada waktu konstruksi kurikulum dilakukan.

- b. Menilai performa kurikulum sebagai dokumen, program pendidikan Hospitaliti Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang dipergunakan saat ini.
- c. Menilai keterkaitan implementasi kurikulum dengan pencapaian tujuan.
- d. Menilai konsistensi ide kurikulum dengan dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum serta kemungkinan *outcomes* dari kurikulum.
- e. Menguji keterandalan dari model evaluasi responsif dalam program pendidikan Hospitaliti Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait yang diuraikan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan dasar teoritik relevansi dalam pengembangan kurikulum. Peneliti mengembangkan dasar teoritik yang digali dari wawancara mendalam dengan seorang ahli kurikulum, Hamid Hasan. (Januari:2012). Dasar teoritik

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

relevansi yang dikembangkan ini merupakan prinsip dasar, yang dapat membantu pengembang kurikulum dalam mengembangkan sebuah kurikulum, karena seorang pengembang kurikulum dituntut untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan, saat mahasiswa telah menyelesaikan studinya. Berhubung relevansi ini ditetapkan pada waktu konstruksi kurikulum dilakukan, maka pengembang kurikulum harus mampu memandang jauh ke depan.

2) Mengembangkan prosedur baru model Evaluasi Responsif dari Stake. Peneliti merevisi model ini dan mengembangkannya menjadi prosedur baru, sehingga dapat dijadikan panduan oleh evaluator internal. Dengan model yang direvisi ini, diharapkan bias pribadi (subjektivitas) dapat ditekan sampai ke tingkat yang derajatnya dianggap objektif. Prosedur dari model ini sebelumnya terdiri dari 12 langkah peristiwa (*events*), dimodifikasi menjadi tujuh *events* dan dalam peristiwa analisis ditambahkan *expert panel* atau *focus group discussion*. Dengan demikian, maka model Evaluasi Responsif diperkaya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penentu kebijakan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan khususnya studi Administrasi Perhotelan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan untuk melakukan perbaikan maupun perubahan terhadap perumusan ide kurikulum dan dokumen serta proses atau implementasi kurikulum.

Lien Maulina, 2013

Evaluasi Kurikulum Model Responsif Program Pendidikan Diploma IV Studi Administrasi Perhotelan
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2) Bagi pengelola perguruan tinggi kepariwisataan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan pandangan dalam membuat keputusan yang tepat dan terbaik dalam merumuskan ide dan dokumen kurikulum serta proses atau implementasi kurikulum.

E. Pendekatan Penelitian

Untuk mengetahui sampai sejauh mana relevansi antara desain dengan tuntutan lapangan, melihat performa kurikulum sebagai dokumen, melihat keterkaitan implementasi kurikulum dengan pencapaian tujuan dan menilai konsistensi ide kurikulum dengan dokumen kurikulum, ide kurikulum dengan implementasi kurikulum serta ide kurikulum dengan *outcomes* dari kurikulum studi Administrasi Perhotelan pendidikan kepariwisataan dalam menyiapkan sumber daya manusia bagi industri pariwisata yang optimal, peneliti harus menemukan unsur-unsur pokok sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, maka digunakan penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif, karena segmen yang khusus dan terbatas, maka untuk model evaluatif kualitatif dipilih model yang khusus pula, yaitu model Evaluasi Responsif.

Pemilihan model ini juga didasarkan pada hasil konsultasi langsung, komunikasi personal peneliti dengan Robert E. Stake (2012), penemu model penelitian *case study*, *Education Countenance model* dan *Responsive Evaluation model*. Stake menyarankan dalam penelitian evaluasi kurikulum program pendidikan Diploma IV

ini agar digunakan model Evaluasi Responsif, karena model ini lebih berorientasi pada aktifitas, keunikan dan kemajemukan dari masyarakat yang terlibat dalam program. Selain itu sifat dasar yang istimewa dari pendekatan ini adalah kesediaan mendengarkan isu kunci atau problema terutama yang telah diketahui oleh orang di lapangan dan kelengkapan aspek kurikulum yang dievaluasi.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah atau cara baru untuk memperkaya model Evaluasi Responsif yang telah ada sebelumnya. Sehubungan dengan status peneliti sebagai dosen yang telah bekerja sejak tahun 1982 di lembaga ini, maka diperlukan perubahan prosedur dalam analisis data. Prosedur baru dalam analisis data ini dimaksudkan untuk mengurangi bias pribadi (subjektivitas) sampai ke tingkat yang derajatnya dianggap objektif. Prosedur baru dalam analisis data menjadi hal baru dalam evaluasi kurikulum yang menggunakan model Evaluasi Responsif, sehingga penerapan evaluasi kurikulum untuk evaluator internal lebih terbuka bagi siapa saja, dan kelemahan internal evaluator dapat dikurangi.

Peneliti atau evaluator adalah seorang alumni yang sudah bekerja pada lembaga tersebut, dan pernah menjabat sebagai ketua dan sekretaris program studi di beberapa program studi termasuk studi Administrasi Perhotelan, sehingga tidak diperlukan lagi familisasi, sebab peneliti berada dalam posisi yang paham tentang apa yang terjadi di lembaga ini yang mungkin sulit dimiliki oleh peneliti yang datang dari luar. Oleh sebab itu dicari pendekatan dan prosedur dalam analisis data agar evaluator

dapat memisahkan pendapat *stakeholders* yang terdiri dari *stakeholders* pemerintah, pengelola program, dosen, mahasiswa, alumni, para *expert* dari dunia industri.

Prosedur baru yang dikembangkan oleh peneliti didasarkan pada model pokok *Responsive Evaluation* dari Stake, yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan peneliti, untuk menjamin objektivitas data dan analisis. Prosedur baru dalam evaluasi ini adalah perubahan dari model asli *Responsive Evaluation* yang terdiri dari duabelas peristiwa (*events*) menjadi tujuh buah peristiwa, selain itu peneliti berusaha untuk peka terhadap berbagai pandangan, dan berusaha mengakomodasi pendapat yang ambigu serta tidak fokus pada yang datang dari pelaksana kurikulum (staf, sekretaris, ketua program studi, dosen, tenaga pengajar, alumni, serta mahasiswa), pejabat pertama yang menjadi ketua program Studi Hotel Administration dan ketua STPB periode Studi Administrasi Perhotelan dibentuk, dan "user" Hasil temuan dianalisis ulang oleh sebuah panel *expert* (*Focus Group Discussion*) yang tidak terlibat dalam penelitian kurikulum yang dikaji, seperti tenaga ahli (*expert*) dari dunia industri perhotelan (*user*) dan para ahli kurikulum dari dunia pendidikan. Perbedaan pandangan (jika ada) antara pelaksana kurikulum dan para *expert* di atas dianalisis melalui dialog yang penulis lakukan pada kedua pihak secara terpisah.